

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu permasalahan global yang paling krusial dan sering menjadi topik pembahasan yang menarik bagi negara-negara lainnya. Seluruh dunia mengalami adanya masalah pertumbuhan penduduk yang semakin pesat setiap tahunnya sehingga dapat menyebabkan kepadatan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat di suatu negara akan memunculkan berbagai permasalahan seperti kemiskinan yang semakin tinggi, lapangan kerja yang tidak sesuai dengan penawaran, serta kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang memadai. Berbagai permasalahan sosial ini nantinya akan menghambat pembangunan nasional di suatu negara (Ninawati et al., 2024).

Tantangan Indonesia terkait permasalahan pertumbuhan penduduk sudah terjadi sejak lama dan masih terjadi hingga saat ini. Pada masa Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto menjadi tonggak penting dalam sejarah program KB (Keluarga Berencana) di Indonesia. (Rahmadhony & Gayatri, 2021) Pada masa itu semua kebijakan masih bersifat sentralistik termasuk kebijakan terkait program KB dan kebijakan KB dianggap berhasil. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk akan menyangkut generasi yang akan datang dan menyangkut kesejahteraan masyarakat di masa itu.

Masa Orde Baru kebijakan melalui program KB dianggap berhasil. Akan tetapi, keberhasilan program KB pada masa kini tidak sebaik pada masa Orde Baru. Hal ini ditunjukkan hingga saat ini masih terjadi kenaikan jumlah penduduk

di Indonesia seiring berjalannya waktu sehingga menghambat peningkatan kualitas penduduk. Meskipun hingga saat ini program KB masih berjalan di Indonesia, hanya saja pertumbuhan penduduk semakin melonjak. Akibatnya, pemerintah memiliki beban yang semakin berat untuk menanggulangi permasalahan pertumbuhan penduduk yang jumlahnya terus naik. (Fathina, 2022)

Pertumbuhan penduduk menyebabkan suatu negara menjadi negara berkembang dimana hal ini sedang dialami di negara Indonesia. Karakteristik Indonesia sebagai negara berkembang diantaranya ditunjukkan karena faktor angka kelahiran tinggi diakibatkan karena kurangnya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat terhadap program KB yang menyebabkan Indonesia menempati urutan keempat penduduk terbanyak dunia.

Indonesia	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa)		
	2019	2020	2021
Indonesia	266.911,9	270.203,9	272.682,5

Indonesia	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa)		
	2022	2023	2024
Indonesia	275.773,8	278.696,2	281.603,8

Tabel 1. 1 Data BPS Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia

Menurut data dari Worldometer (Worldometer, 2024) yang merupakan data terkini dari PBB menunjukkan bahwa saat ini jumlah pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 284 juta jiwa dimana jumlah ini setara dengan 3,47% dari total penduduk dunia. Penjabaran lainnya terkait pertumbuhan penduduk di Indonesia didapat dari data BPS (Badan Pusat Statistik) yang diambil selama 5

tahun dari tahun 2020-2024. Data dari BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2020 jumlah penduduk di Indonesia sebesar 270.203,9 ribu jiwa, tahun 2021 naik menjadi 272.682,5 ribu jiwa, tahun 2022 naik sebesar 275.773,8 ribu jiwa, tahun 2023 naik menjadi 278.696,2 ribu jiwa, dan pada tahun 2024 jumlahnya naik menjadi 281.603,8 per tanggal 28 Juni 2024 dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2024 adalah 1,11%.

Pada masa Reformasi, aturan yang melekat dalam penerapan program KB di Indonesia termuat di dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai upaya untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran, kesehatan bagi ibu dan bayi, serta meningkatkan keluarga berkualitas. Tujuan peraturan tersebut untuk meningkatkan pembangunan nasional dengan mewujudkan kualitas masyarakat. Kuantitas penduduk akan mempengaruhi arah pembangunan nasional dimana kualitas SDM rendah akan memperlambat pembangunan, sedangkan SDM berkualitas akan mempercepat pembangunan.

Berbagai upaya pemerintah terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas penduduk dan pembangunan nasional dengan diciptakannya program Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas). (Maleke et al., 2022) Bahwa Kampung KB berperan sebagai upaya penyempurnaan pelaksanaan program KB karena dinilai pengetahuan masyarakat terhadap kebutuhan reproduksi dan kesejahteraan keluarga belum maksimal. Diharapkan dengan adanya Kampung KB masyarakat dapat berperan aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan.

Program Kampung KB mulai diimplementasikan pada masa kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai agenda dari prioritas pembangunan Nawacita dalam periode 5 tahun yang dilaksanakan pada tahun 2015-2019 (Hasriani, 2021). Kampung KB terdapat dalam agenda prioritas ketiga (pembangunan daerah pinggiran, agenda prioritas kelima (peningkatan kualitas SDM), dan agenda prioritas kedelapan (pendidikan dan partisipasi masyarakat). (Rofik, 2021). Program ini mulai dilaksanakan di Indonesia pada tanggal 14 Januari 2016 sebagai penetapan dari RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Pada mulanya, program tersebut bernama Kampung Keluarga Berencana yang kemudian diubah menjadi Kampung Keluarga Berkualitas berdasarkan Surat Edaran Kemendagri No.843.4/2879/SJ pada tanggal 15 April 2020 sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo. Sehingga pada tahun 2020 pergantian nama tersebut mulai diterapkan. (BKKBN, 2023) Penyebab pergantian nama ini dikarenakan penyelenggaraan Kampung KB dinilai belum diimplementasikan secara maksimal. Istilah “Kampung Keluarga Berencana” dinilai bahwa pengelolaan program tersebut hanya milik BKKBN dan hanya mempersoalkan program KB. Pada kenyataannya program Kampung KB tidak hanya menggalakkan program KB itu sendiri, tetapi mengintervensi keseluruhan sektor dalam rangka peningkatan pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan pembangunan keluarga.

Peraturan untuk mendukung Kampung KB termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga

menjadi peraturan terselenggaranya Kampung KB dalam rangka pembangunan keluarga untuk mewujudkan keluarga berkualitas dengan cara menjaga ketahanan dan kesejahteraan keluarga, meningkatkan pengetahuan masyarakat, dan partisipasi kader dalam pelayanan masyarakat. Peraturan lainnya termuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas yang bertujuan dalam rangka peningkatan kualitas SDM serta memberdayakan keluarga melalui penyelenggaraan Kampung KB di tingkat desa/ kelurahan.

Kampung KB menjadi strategi kecil yang diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan sesuai dengan indikator KKBPK yang dimuat di dalam program Bangga Kencana meliputi pembangunan keluarga, kependudukan, dan program KB. Indikator keberhasilan Kampung KB diantaranya adalah adanya pokja dan kader, terdapat data kependudukan dan pembangunan keluarga yang valid, serta adanya dukungan dari pemerintah setempat dan lintas sekor. Keberhasilan indikator dari pelaksanaan Kampung KB dapat terlihat dari hasil/ *output*. (Asnani & Shodiq, 2022) Keberhasilan Kampung KB memerlukan dukungan dari lembaga BKKBN, pemerintah setempat, para kader Kampung KB, PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), kerja sama dengan mitra lain, *stakeholder* yang sesuai dengan kebutuhan, dan partisipasi masyarakat. Faktor keberhasilan lainnya terletak pada pelaksanaan Poktan (Kelompok Kegiatan) serta pemenuhan KB. (Cicinta, 2023) Poktan terbagi menjadi 5 yaitu BKB (Bina Keluarga Balita) untuk tumbuh kembang balita, BKR (Bina Keluarga Remaja) fokus bimbingan kepada perkembangan anak remaja, BKL (Bina Keluarga Lansia) fokus pada

keterampilan lansia, PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) fokus edukasi pada remaja, dan UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) fokus pada kesehatan reproduksi dan pengembangan ekonomi.

Untuk mengimplementasikan program Kampung KB diperlukan perhatian dari beberapa aspek penting diantaranya adalah SDM (Sumber Daya Manusia), alokasi dana/ anggaran, dan fasilitas/ sarana prasarana. Dana/ anggaran menjadi hal penting untuk keberjalanan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dimana dana/ anggaran diperoleh dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dana bantuan, dan dana swadaya. Terakhir yaitu fasilitas/ sarana prasarana yang tersedia seperti lokasi penyuluhan dan edukasi, media, serta sarana pelaporan (Hasriani et al., 2021).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga pelaksanaan program Kampung KB dilaksanakan secara desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Peraturan mengenai Kampung KB di Jawa Tengah termuat dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah. Isi dari peraturan ini adalah Kampung KB dilaksanakan pada level desa/ kelurahan.

Diluncurkannya Kampung KB di Indonesia menciptakan berbagai penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan acuan/ referensi untuk mendalami

topik penelitian yang diteliti. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan topik penelitian ini yang berjudul Implementasi Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas (Studi Kasus: Kampung KB Mekar Melati, Kelurahan Tambakrejo, Kota Semarang).

Penelitian pertama yang berjudul Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Gerbang Seribu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda (Sari, 2020) meneliti terkait hambatan dan dukungan dalam pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Melalui teori implementasi oleh Miles, Huberman, dan Saldana implementasi program belum berjalan efektif. Dalam penelitian ini hambatan yang terjadi yaitu masih kuantitas dan kualitas kader masih terbatas, partisipasi masyarakat minim, program yang berjalan belum maksimal dikarenakan pelatihan kurang merespon dari kendala yang ada sehingga hasil laporan minim, kurangnya dukungan dari tokoh masyarakat, keterbatasan sarana prasarana (fasilitas), serta masih adanya rangkap pekerjaan karena kurangnya koordinasi. Sedangkan faktor mendukungnya adalah sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan aturan, SDM yang masih berkompeten untuk menangani Kampung KB Gerbang Seribu, dan bantuan operasional.

Penelitian selanjutnya dari dengan judul Implementasi Program Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Melalui Wadah Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Tampuna-Kecamatan Bungi Kota Baubau (Nurbaena, 2020) menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berupa

observasi dan wawancara. Hasil penelitian bahwa implementasi masih terjadi hambatan dan dukungan. Faktor hambatan di Kampung KB Kelurahan Tampuna masih adanya keterbatasan petugas PLKB dalam menyampaikan sosialisasi, anggaran kurang mencukupi, kurangnya partisipasi serta kesadaran masyarakat, dan fasilitas belum tersedia sehingga akses pelayanan kepada masyarakat sulit. Sedangkan faktor mendukungnya yaitu terjadinya perkembangan usaha masyarakat, PLKB dan kader yang berkomitmen positif terhadap kebutuhan Kampung KB, terbangunnya mitra kerja, Kampung KB Kelurahan Tampuna dilaksanakan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) melalui sistem pelaporan dan pembagian tugas. Maka dari itu, implementasi Kampung KB Kelurahan Tampuna dinilai berjalan dengan baik.

Jurnal penelitian oleh berjudul Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru (Batubara et al., 2024) menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Charles O Jones. Faktor yang mendukung Kampung KB di Kelurahan Pandak Meranti karena sudah memiliki struktur kelompok kerja yang jelas sesuai dengan tupoksinya meskipun sempat mengalami vakum karena Covid-19, anggaran yang jelas untuk melaksanakan program, SDM yang memenuhi yaitu sebanyak 40 pokja. Implementasi Kampung KB Meranti Pandak juga terdapat faktor hambatan diantaranya adalah kualitas/ pemahaman oleh pokja masih berbeda yang disebabkan karena pergantian kader di tengah jalan, banyak masyarakat yang tidak mengetahui program Kampung KB sehingga masyarakat

hanya mengetahui Posyandu untuk program KB saja, RKM (Rencana Kerja Masyarakat) sudah berlangsung lama tetapi tidak ada bukti dokumen kegiatan, serta laporan yang terbatas pada *website* sehingga peneliti sulit untuk melihat kegiatan yang telah dilaksanakan.

Selanjutnya, penelitian dengan judul Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Boddie Kabupaten Pangkep (Rachmawati, Razak et al., 2022). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Indikator penelitian menggunakan teori implementasi dari George C. Edwards III. Implementasi Kampung KB di Desa Boddie dikatakan cukup baik meski masih terjadi hambatan. Hambatan yang terjadi hanya dari faktor SDM yaitu kader yang belum cukup baik serta masyarakat yang kurang sadar terhadap program Kampung KB, tetapi hal dari hal tersebut pihak UPT berupaya meningkatkan kualitas sosialisasi. Banyak aspek faktor yang mendukung implementasi Kampung KB Desa Boddie seperti penyampaian informasi yang baik sehingga masyarakat mengetahui informasi Kampung KB, pembagian tugas yang sesuai aturan, serta pelaksanaan tugas berjalan dengan baik.

Menurut penelitian oleh dengan judul Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat (Studi Kasus Desa Sumberkarang Kabupaten Mojokerto) (Anggraeni et al., 2020) menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengimplementasian Kampung KB Desa Sumberkarang terdapat faktor yang mendukung dan menghambat. Faktor yang

mendukung bahwa pelaksanaan Kampung KB telah sesuai dengan SOP yang mengacu pada buku petunjuk teknis, adanya dukungan tokoh masyarakat, poktan yang terlaksana dengan baik, serta sosialisasi yang diadakan secara rutin. Banyak masyarakat yang telah antusias terhadap kegiatan dari Kampung KB, tetapi hambatan yang terjadi masih terdapat beberapa masyarakat yang kurang peduli terhadap kehadiran Kampung KB di Desa Sumberkarang serta keterbatasan kader yang menyebabkan rangkap tugas.

Kelima penelitian diatas memiliki relevansi dengan topik penelitian yang akan diteliti terkait pengimplementasian Kampung KB Mekar Melati di Kelurahan Tambakrejo. Penelitian tersebut dapat memberikan wawasan terhadap teori dasar, penggunaan metode, dan hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai acuan referensi terkait faktor hambatan serta dukungan melalui implementasi Kampung KB Mekar Melati.

Sebagai ibukota dan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang menjadi bagian dalam pelaksanaan program Kampung KB. Penelitian ini dipilih di Kota Semarang karena masih jarang sekali peneliti yang membahas terkait implementasi program Kampung KB. Pemerintah Kota Semarang (Pemkot Semarang) mulai mengimplementasikan Kampung KB pada tahun 2016 berdasarkan SK Walikota Nomor 476/1164 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB. Adanya Kampung KB diharapkan supaya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta pembangunan keluarga. Kampung KB di Kota Semarang berada di bawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang (Disdalduk KB

Kota Semarang). Kemudian berlanjut pada tahun 2023 ditetapkan kebijakan bahwa masing-masing kelurahan harus wajib memiliki Kampung KB. Maka dari itu, saat ini Kampung KB di Kota Semarang berjumlah 177.

Salah satu Kampung KB di Kota Semarang yang menjadi topik penelitian ini adalah Kampung KB Mekar Melati yang terletak di Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari. Kampung KB Mekar Melati mulai diimplementasikan pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena pengambilan kebijakan Pemkot Semarang yang mewajibkan setiap kelurahan memiliki Kampung KB. Peraturan yang melandasi terselenggaranya Kampung KB Mekar Melati termuat dalam SK Lurah Tambakrejo Nomor 411.4/53/XII/Tahun 2022.

Saat ini Kampung KB Mekar Melati masuk dalam klasifikasi mandiri. Kampung KB Mekar Melati memenuhi syarat sebagai wilayah 3T yaitu sebagai wilayah tertinggal. (Shaina, 2023) Dikatakan wilayah tertinggal apabila kualitas pembangunan masyarakat kurang berkembang, kemiskinan tinggi, serta rentan terjadi bencana. Kelurahan Tambakrejo terletak di wilayah utara Kota Semarang dimana masyarakatnya masih terbelakang kurang berkembang, kemiskinan yang cenderung masih tinggi, serta rentan terjadi banjir dan rob. Melihat latar belakang yang terjadi di Kelurahan Tambakrejo membuat peneliti tertarik untuk meneliti terkait implementasi Kampung KB Mekar Melati pada tahun 2023-2024. Program kegiatan Kampung KB sendiri memang sangat cocok untuk diterapkan di wilayah dan kondisi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program Kampung KB Mekar Melati di Kelurahan Tambakrejo?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung implementasi Kampung KB Mekar Melati di Kelurahan Tambakrejo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi program Kampung KB Mekar Melati di Kelurahan Tambakrejo. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung implementasi Kampung KB Mekar Melati.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan terkait studi ilmu pemerintahan mengenai implementasi dari sebuah kebijakan/program pemerintah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pelengkap dari penelitian sebelumnya dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki bahasan topik sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Kelurahan Tambakrejo dan kader Kampung KB Mekar Melati sebagai kritik dan saran dalam upaya pengembangan Kampung

KB Mekar Melati kedepannya. Selain itu, bagi para pembaca untuk memperoleh pengetahuan terkait implementasi program Kampung KB Mekar Melati.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah sebuah proses untuk melaksanakan suatu program kegiatan setelah ditetapkannya kebijakan oleh lembaga/ badan tertentu. Pada prinsipnya, implementasi digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, implementasi menjadi hal yang penting dalam suatu kebijakan karena dapat menentukan kebijakan tersebut apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum. Implementasi berasal dari terjemahan “*implementation*” yang berasal dari kata “*to implement*” dimana terdapat 3 arti. Pertama, *to carry into effect* mengartikan bahwa mewujudkan sesuatu (hasil). Kedua, *to provide with the means for carrying out into effect* bahwa memberi sumber daya supaya dapat mewujudkan hasil. Ketiga, *to provide or equip with implement* yaitu melengkapi melalui sarana yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Ketiga definisi tersebut dapat diartikan bahwa implementasi digunakan untuk mewujudkan sesuatu (hasil) yang memerlukan sarana dan sumber daya untuk mencapai tujuan.

Dari ketiga arti kata “*to implement*” bahwa implementasi akan mempengaruhi tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan/ program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tingkat keberhasilan atau kegagalan ini dipengaruhi oleh sumber daya yang ada dalam pelaksanaan implementasi. Teori ini dikemukakan oleh Siagian (1995:225):

“Implementasi adalah strategi serta pengelolaan sistem yang berlaku dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan dengan

melibatkan sumber daya seperti manusia, struktur, proses administrasi dan manajemen, serta dana.”

Dalam hal ini menurut Siagian (1995:225) keberhasilan implementasi semata-mata hanya membuahkan hasil. Akan tetapi, dalam proses implementasi kebijakan/ program memerlukan adanya berbagai unsur untuk mendukung tercapainya tujuan seperti manusia, struktur, proses administrasi dan manajemen, dana, serta fasilitas yang ada.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) (Pramono, 2020) implementasi dimaknai sebagai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setelah disahkannya pedoman kebijakan yang nantinya akan menimbulkan dampak nyata (kejadian) di masyarakat. Maksud definisi dari Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier adalah bahwa adanya kebijakan yang telah dibentuk dan disahkan tidak hanya didiamkan saja, tetapi perlu adanya pelaksanaan secara nyata agar dapat mencapai suatu tujuan. (Mutiarin, 2014) Udoji (dalam Abdul Wahab, 1990:59) bahwa implementasi merupakan sesuatu yang lebih penting dibandingkan pada saat kebijakan dibuat. Kemudian menurut Van Meter dan Van Horn implementasi merupakan tindakan di dalam keputusan sebelumnya. Hal tersebut mengartikan bahwa adanya usaha untuk mengubah keputusan tersebut menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu. Implementasi dapat mempengaruhi baik perubahan kecil ataupun perubahan besar yang telah ditetapkan dari keputusan kebijakan.

Definisi implementasi tidak hanya sebatas pada pelaksanaan suatu kebijakan untuk mencapai sebuah tujuan, tetapi juga harus memperhatikan

kebutuhan publik (Tjilen, 2020). Teori implementasi menurut Wahab, 2009 mengatakan bahwa:

“Implementasi kebijakan tidak hanya sekadar berkaitan dengan keputusan politik melalui birokrasi, tetapi lebih berkaitan terhadap masalah konflik, keputusan, serta siapa yang memperoleh apa dari adanya kebijakan.”

Teori Wahab diatas mengandung makna bahwa kebijakan yang diimplementasikan disebabkan karena terdapat masalah/ konflik yang terjadi di masyarakat sehingga pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan sebagai pemecahannya. Kemudian kebijakan tersebut diaplikasikan melalui pemerintah pada level operasional agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Implementasi dinilai lebih efektif apabila pemerintah lebih bawah peka dan merumuskan suatu program kerja/ kegiatan yang berpengaruh pada masyarakat.

Implementasi suatu kebijakan/ program akan berjalan lebih baik apabila terdapat jalinan kerjasama/ koordinasi di dalamnya. Hal tersebut dikemukakan oleh Dunn (1999:32):

“Implementasi menjadi fenomena yang kompleks dimana tingkat keberhasilannya membutuhkan kerjasama/ koordinasi supaya suatu kebijakan dapat dilaksanakan. Keterlibatan kerjasama/ koordinasi disebabkan karena dinamisnya permasalahan di masyarakat sehingga dibutuhkan banyak komponen dalam pelaksanaan kebijakan.”

Implementasi menurut Dunn (1999:32) mengartikan bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan/ program membutuhkan kerjasama/ koordinasi. Selain itu, ditengah perubahan masalah-masalah yang sering terjadi ditengah masyarakat membutuhkan kerjasama/ koordinasi supaya pelaksanaan kebijakan/

program dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, dalam proses implementasi diperlukan 3 hal utama yaitu:

1. Terdapat kebijakan/ program yang dilaksanakan.
2. Terdapat sasaran/ target dari adanya suatu kebijakan/ program yaitu kelompok masyarakat. Diharapkan dengan adanya implementasi kelompok tersebut dapat memperoleh manfaat, perubahan, dan peningkatan.
3. Terdapat implementator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan suatu kebijakan/ program.

Berbagai uraian teori oleh para ahli mengenai definisi implementasi bahwa adanya implementasi/ penerapan suatu kebijakan/ program tidak akan terjadi apabila tujuan serta sasaran belum ditetapkan. Selain itu, implementasi juga tidak terlepas dari adanya peran aktor. (Kadji, 2015) Supaya dapat menjelaskan makna implementasi lebih dalam terdapat indikator implementasi menurut teori George C. Edward III (dalam Subarsono, 2011):

1. Komunikasi (*communication*)

Dalam teorinya, komunikasi memegang aspek penting dalam proses implementasi karena pelaksana kebijakan harus mengetahui dan memahami apa yang menjadi tugasnya. Sehingga perintah/ aturan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten supaya tidak terjadi kesalahpahaman (*distorsi*) dalam proses implementasi. Penyampaian pesan dapat dibagi menjadi 2 yaitu komunikasi formal dan komunikasi non-formal. Komunikasi formal terbentuk dari hal yang bersifat terencana melalui jalur formal. Sementara komunikasi non-formal bersifat insidental dimana menurut kebutuhan/ kepentingan.

2. Sumberdaya (*resources*)

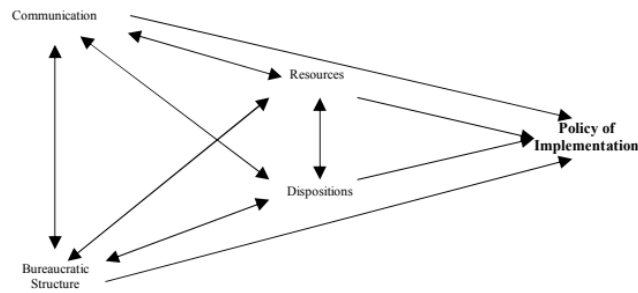
Sumberdaya juga berpengaruh dalam keberhasilan proses implementasi. Hal tersebut akan sia-sia apabila komunikasi yang dijalankan sudah baik, tetapi dari segi sumberdaya masih kurang memadai. Sumber daya meliputi SDM (manusia), dana/ anggaran, dan sarana prasarana (fasilitas). Ketiga aspek ini sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Apabila sumberdaya tidak terpenuhi, maka implementasi suatu program terbilang buruk.

3. Disposisi (*disposition*)

Indikator ini mengarah pada watak/ sikap dari pelaksana implementasi suatu program. Implementator yang berwatak baik dapat menjalankan kebijakan yang sebelumnya telah dibuat oleh pembuat kebijakan. Akan tetapi implementator yang menyimpang dari keinginan sang pembuat kebijakan, maka berakibat implementasi semakin membingungkan dan tidak mengerti arah. Watak serta karakter dari implementator menjadi cerminan terhadap dampak/ hasil suatu kebijakan/ program.

4. Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*)

Struktur birokrasi memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan/ program. Indikator ini berfokus pada sistem organisasi, prosedur, dan koordinasi/ kerjasama dengan lembaga yang bersangkutan. Pada pelaksanaannya, struktur birokrasi harus berlandaskan pada SOP (*Standard Operating Procedure*) dan fragmentasi. Struktur birokrasi yang cenderung panjang, rumit, dan kompleks dapat menyebabkan implementasi berjalan tidak efektif.



Gambar 1. 2 Model Implementasi George C. Edward III

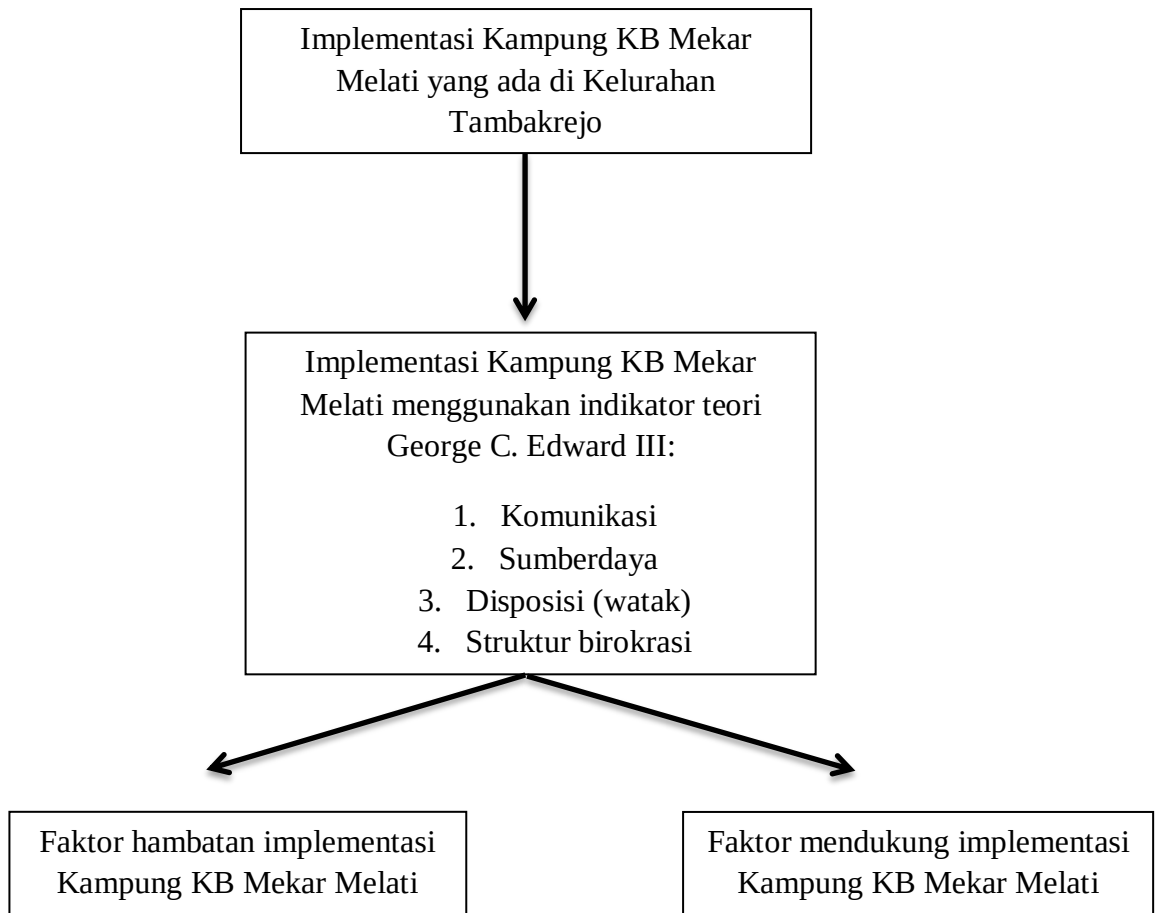
Sumber: Buku Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik

Tidak seluruhnya implementasi dikatakan berjalan sesuai rencana. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan implementasi tersebut gagal dimana hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Berikut ini faktor yang dapat menyebabkan kegagalan implementasi:

- 1) Kurangnya informasi sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan kebijakan/ program yang kurang tepat kepada objek serta pelaksana.
- 2) Tidak tegasnya (samar) isi implementasi kebijakan tersebut sehingga menghasilkan ketidaktepatan tujuan.
- 3) Dukungan yang sedikit/ kecil terhadap implementasi.
- 4) Pembagian tugas dan wewenang implementator yang tidak sesuai dengan potensinya.

Teori implementasi memiliki relevansi dengan topik penelitian terkait implementasi program Kampung KB Mekar Melati yang berlokasi di Kelurahan Tambakrejo. Implementasi tersebut bertujuan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program Kampung KB Mekar Melati melalui kegiatan-kegiatan, partisipasi, sumberdaya, serta koordinasi apakah sudah mencapai tujuan yang tepat sasaran.

1.6 Kerangka Berpikir



1.7 Operasionalisasi Konsep

Indikator	Sub Indikator	Keterangan
Komunikasi	Komunikasi yang efektif	Media yang digunakan dalam penyampaian informasi antar aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Kampung KB Mekar Melati.
	Kejelasan pada program	Memberikan informasi yang jelas kepada aktor yang terlibat supaya tidak terjadi <i>miscommunication</i> dalam implementasinya.
	<i>Feedback</i>	Diharapkan adanya komunikasi dapat memberi umpan balik.
	Ketepatan waktu informasi	Penyampaian informasi yang tepat waktu kepada masyarakat terkait kegiatan yang akan dilakukan Kampung KB yang tepat waktu.
Sumberdaya	Keterlibatan SDM	Aspek SDM yang cukup dan mumpuni dapat berpengaruh terhadap keberjalanan program Kampung KB Mekar Melati.
	Anggaran/ dana	Ketersediaan anggaran/ dana yang cukup untuk mendukung implementasi kegiatan program Kampung KB Mekar Melati.
	Fasilitas sarana prasarana	Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang mudah diakses untuk mendukung keberjalanan Kampung KB Mekar Melati
	Keterlibatan sektor lain	Keterlibatan sektor lain yang penting dalam mendukung implementasi Kampung KB Mekar Melati untuk mendapat pelatihan, edukasi, pemberdayaan.
Disposisi	Komitmen	Pertanggung jawaban dari aktor yang terlibat untuk mendukung implementasi program.
	Motivasi	Diperlukan adanya daya dukung yang tinggi dalam implementasi Kampung KB Mekar Melati supaya tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.
	Pemahaman implementasi	Pihak yang terlibat (pemerintah, kader, dan masyarakat) dapat memahami serta berpengetahuan terkait adanya implementasi Kampung KB Mekar Melati.

	Kepercayaan antar aktor	Kepercayaan yang saling terjalin oleh seluruh pihak yang terlibat untuk mendukung keberhasilan implementasi Kampung KB Mekar Melati.
	Dukungan dari pemimpin	Pemimpin yang baik akan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Kampung KB Mekar Melati untuk mencapai tujuan.
Struktur birokrasi	Kejelasan terhadap tugas	Adanya pembagian tugas akan memperjelas apa yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat.
	Prosedur administrasi	Proses administrasi untuk mendukung implementasi program Kampung KB Mekar Melati seperti pencatatan kegiatan dan pelaporan.
	Keterlibatan dalam pengambilan keputusan	Partisipasi dari aktor yang terlibat secara langsung dapat digunakan untuk pengambilan keputusan kegiatan selanjutnya oleh Kampung KB Mekar Melati.
	Pengawasan	Pemantauan dan penilaian dalam pelaksanaan kegiatan Kampung KB Mekar Melati secara berkala untuk menilai keberhasilan program.
	Transparansi dan akuntabilitas	Keterbukaan dan pertanggung jawaban dari seluruh aktor dapat menimbulkan adanya kepercayaan.

Tabel 1. 2 Operasionalisasi Konsep Implementasi

1.8 Metode Penelitian

Menurut (Bungin, 2003 : 3) metode penelitian adalah teknik untuk mendapatkan data secara ilmiah. (Sahir, 2021) Penelitian harus bersifat rasional (penelitian dilakukan secara masuk akal sehingga dapat diterima akal manusia), empiris (dapat diamati oleh indera manusia), dan sistematis (penggunaan langkah-langkah penelitian yang bersifat logis). Adanya metode penelitian diharapkan penelitian dapat menunjukkan validitas yaitu ketepatan data yang sesungguhnya pada objek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. (Abdussamad, 2021) Penelitian kualitatif merujuk pada penelitian yang memerlukan adanya analisis secara alami terhadap fenomena yang diamati sehingga peneliti harus langsung turun lapangan. Menurut Bogdan dan Tylor (1982) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata/ lisan dari objek yang diamati. Moleong (2005 :6) penelitian kualitatif adalah memahami fenomena yang dialami subjek yang bersifat alamiah.

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menampilkan data yang apa adanya. (Hanyfah et al., 2022) menurut (Djam'an Satori, 2011 : 23) bahwa pengolahan data bersifat deskriptif dan dilakukan untuk menjelaskan data suatu fenomena/ peristiwa yang diteliti tanpa adanya manipulasi data melalui proses wawancara secara langsung.

1.8.2 Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung KB Mekar Melati yang berada di Kelurahan Tambakrejo. Penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dimana sampel yang diambil tidak dilakukan secara acak, tetapi sampel melalui subjek yang memenuhi syarat. Maka dari itu, subjek harus memiliki latar belakang terhadap penelitian yang diteliti.

Subjek penelitian dalam topik ini meliputi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kota Semarang (Disdalduk KB Kota Semarang), PLKB Kecamatan Gayamsari, pemerintah Kelurahan Tambakrejo, kader-kader Kampung KB Mekar Melati, dan masyarakat Kelurahan Tambakrejo.

1.8.3 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh dari penelitian secara langsung melalui sumber pertama. Pencarian data diperoleh dari wawancara kepada informan untuk menjawab secara langsung terkait persoalan penelitian. Wawancara dilakukan dengan pihak yang terlibat langsung dalam program Kampung KB Mekar Melati.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diperoleh dari sumber pertama melainkan data ini menjadi pelengkap dan penguat data primer. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dokumen resmi pemerintah, dan *website*. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang memuat Kampung KB Mekar Melati seperti jumlah partisipasi keluarga dalam Poktan dan KB, jumlah kader Kampung KB Mekar Melati, data Poktan Kampung KB Mekar Melati, dan lain-lainnya.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber terkait topik permasalahan yang sedang diteliti. Dalam menentukan narasumber, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* karena informan terpilih memahami dengan topik penelitian yang diangkat. Peneliti melakukan wawancara terstruktur dimana peneliti ingin

mendapatkan informasi yang lebih mendalam terhadap topik penelitian dengan cara mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelum melakukan wawancara.

Dalam penelitian ini, yang menjadi informan untuk dapat diwawancarai adalah:

1. Kepala Bidang PP Disdalduk KB Kota Semarang
2. PLKB Kecamatan Gayamsari
3. Lurah Kelurahan Tambakrejo
4. Ketua Kampung KB Mekar Melati
5. Sekretaris Kampung KB Mekar Melati (1)
6. Kader Poktan KKB Mekar Melati (1)
7. Kader KB Kampung KB Mekar Melati (1)
8. Masyarakat yang berdampak (10)

b. Dokumentasi

Pengumpulan data berupa dokumentasi dapat melalui dokumen-dokumen serta gambar yang berkaitan dengan pelaksanaan program Kampung KB Mekar Melati. Data dokumentasi dapat melengkapi wawancara sehingga data yang disajikan dalam penelitian ini bersifat kredibel dan akuntabel karena didukung dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung, mencatat, serta menganalisis terhadap objek atau fenomena yang diteliti supaya lebih memahami dan lebih berpengetahuan dari fenomena yang sedang diteliti.

d. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data (primer dan sekunder) untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan lebih akurat.

1.8.5 Analisis Interpretasi Data

Analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang selanjutnya diolah sehingga dapat memberikan informasi bagi orang lain. Penelitian ini menggunakan model analisis interpretasi data dari Miles dan Hubberman (1984) dimana untuk menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan langsung dan dilakukan hingga tuntas sampai mencapai data jenuh. Model analisis Miles dan Hubberman adalah *data reduction, data display, and conclusion drawing/ verification*.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang ditemukan di lapangan jumlahnya sangat banyak sehingga harus dirangkum, berfokus pada hal-hal yang penting, dan mencari tema polanya. Data yang telah dianalisis dengan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti dalam proses pengumpulan data selanjutnya. Proses reduksi data lebih memfokuskan terhadap temuan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah melakukan reduksi data selanjutnya diperlukan adanya penyajian data. Penyajian data akan memudahkan pemahaman penelitian yang sedang terjadi supaya dapat melanjutkan perencanaan penelitian kedepannya berdasarkan

apa yang telah dipahami. Proses penyajian data tidak hanya berupa teks narasi saja, tetapi juga matrik, grafik, serta bagan.

c. Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing or Verification*)

Langkah terakhir yakni berupa kesimpulan dan verifikasi dimana kesimpulan awal masih bersifat sementara dan dapat berubah. Akan tetapi, jika kesimpulan bersifat valid saat ke lapangan, maka kesimpulan tersebut bersifat kredibel. Kesimpulan masih sementara dan akan berkembang ketika peneliti turun ke lapangan sehingga dapat dikatakan bahwa kesimpulan adalah temuan yang sebelumnya belum pernah ada/ gambaran suatu objek yang masih samar.